

BAB V.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis praktik diskresi *street-level bureaucracy* dalam penetapan calon penerima manfaat sosial di wilayah peri-urban Kabupaten Banjarnegara, dengan tiga fokus utama: implementasi kriteria kelayakan, faktor-faktor yang memengaruhi diskresi, dan dampaknya terhadap keadilan distribusi.

1. implementasi kriteria formal tidak dilakukan secara kaku karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi warga. Petugas menyesuaikan penerapan indikator fisik dan administratif melalui observasi dan wawancara, guna memastikan bantuan tepat sasaran dalam konteks lokal yang kompleks.
2. Praktik diskresi dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan personal. Faktor internal seperti kapasitas SDM, koordinasi, dan ketersediaan anggaran berperan penting terutama dalam pelaksanaan musyawarah kelurahan. Faktor eksternal berupa tekanan masyarakat dan dinamika sosial-ekonomi muncul konsisten di seluruh wilayah, sementara tekanan politik tidak ditemukan. Faktor personal seperti empati dan pengalaman kerja turut memengaruhi gaya pengambilan keputusan petugas.
3. Diskresi berdampak ganda terhadap keadilan distribusi. Di satu sisi, diskresi memungkinkan penyesuaian yang lebih adil secara substantif. Namun di sisi lain, berisiko menciptakan *inclusion* dan *exclusion error*, persepsi ketidakadilan di masyarakat, serta perbedaan respons antarpetugas terhadap ketimpangan.

Dengan demikian, diskresi bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan mekanisme adaptif yang digunakan oleh petugas dalam menjembatani keterbatasan regulasi dan kompleksitas sosial dalam implementasi kebijakan sosial di wilayah peri-urban.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada masa transisi dari DTKS menuju DTSEN dan waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan awal tahun anggaran dimana kegiatan verifikasi dan pemutakhiran data belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, serta membatasi ketersediaan informasi dari informan dan dokumen.

Sebagai studi kualitatif di wilayah peri-urban, hasil penelitian ini sangat dipengaruhi oleh konteks lokasi dan karakteristik informan. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam dalam konteks spesifik wilayah peri-urban Kabupaten Banjarnegara.

5.3. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam proses penetapan calon penerima manfaat sosial:

1. Penguatan sistem verifikasi dan validasi berbasis partisipasi, dengan memastikan keterlibatan warga dalam forum musyawarah kelurahan dan peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan.
2. Reformulasi indikator kemiskinan agar lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan beban pengeluaran rumah tangga dan dinamika sosial lokal, bukan hanya kepemilikan aset fisik.
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan supervisi lapangan.
4. Pengembangan sistem digital yang adaptif, dengan mendorong integrasi penuh menuju platform DTSEN yang tidak mengulang kelemahan sistem sebelumnya.
5. Penerapan model diskresi proporsional, yakni memberikan ruang keputusan bagi petugas lapangan, namun disertai mekanisme evaluasi, umpan balik, dan kontrol sosial agar praktik diskresi tetap akuntabel dan selaras dengan prinsip keadilan distributif.

Implikasi-implikasi ini menjadi masukan penting bagi perancang kebijakan sosial dan pelaksana teknis di daerah dalam merancang intervensi yang tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga berkeadilan secara substantif.